

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah (Nahdi, 2008). Keberadaan manusia di muka bumi ini erat kaitannya dengan kuasa Allah SWT sebagai pencipta yang memilih manusia secara langsung untuk memikul amanah sebagai “khalifah” atau “wakil”. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Fatir ayat 39 yang artinya “*Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri*” (Susanti, 2020). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abu Hafsin dalam Ali (2023) bahwa untuk membolehkan manusia menjalankan fungsi kekhalifahannya, Allah SWT juga melengkapi diri manusia dengan potensi intelektual dan spiritual secara sekaligus. Hal ini juga sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan pengertian lingkungan hidup itu sendiri yang di dalamnya telah melibatkan peranan manusia dan perilakunya dalam menyejahterakan makhluk hidup dan dirinya (Watsiqotul et al, 2018).

Dalam perspektif al-Qur’an, istilah pemimpin dalam pengertiannya merujuk pada term khalifah, imamah dan *ulu al-Amr* (Amin et al, 2015), pada dasarnya dari keempat kata tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Arifin (2023) seorang pemimpin dalam Islam diharapkan untuk menjadi teladan moral bagi pengikutnya, serta tidak hanya tentang pengambilan keputusan atau pemerintahan politik dan pengarahan, tetapi juga tentang berperilaku dengan integritas, kejujuran dan keadilan. Islam menekankan bahwa setiap pemimpin, baik dalam skala individu, keluarga, masyarakat, atau negara, memiliki tanggungjawab moral yang besar (Fazillah, 2023). Secara etimologis, pemimpin baik itu dalam organisasi maupun masyarakat (orang), menciptakan lingkungan yang mendukung,

hormat, bertanggungjawab, mengembangkan dan mengontrol (Boiliu, 2014). Konsep ini berkiblat dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang merupakan sentral bagi pemimpin muslim.

Dunia organisasi apapun jenisnya selalu membutuhkan seorang pemimpin dengan kepemimpinannya dan setiap aktifitas yang dilakukan juga membutuhkan pemimpin untuk membantu dalam mengatur, mengontrol dan mengarahkan keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Pemimpin harus siap menjadi orang pertama yang bertanggungjawab atas apapun yang terjadi dengan organisasinya. Oleh karena itu, pemimpin harus menggunakan dayanya (kemampuan) sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasinya (Marliani et al, 2019).

Lembaga pendidikan juga diperlukan seorang pemimpin yang mengawasi jalannya proses dan segala komponen pendukungnya agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan. Menurut Carwell dalam manajemen pendidikan bahwa definisi kepemimpinan sebagai perilaku individu yang menimbulkan struktur baru pada suatu interaksi dalam suatu sistem sosial dengan mengubah tujuan, konfigurasi, prosedur, *input* proses dan *output* sistem (Bashori et al, 2020). Pemimpin dalam lembaga pendidikan adalah kepala sekolah, yang memiliki wewenang penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Kriteria kepala sekolah pun tidak boleh sembarangan, banyak syarat yang diberikan oleh dinas pendidikan untuk seseorang bisa menjadi kepala sekolah. Maka dengan banyaknya kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang di pimpinnya.

Peningkatan mutu sekolah menjadi tuntutan yang krusial. Dari sejumlah komponen pendukung, maka unsur kepala sekolah menjadi komponen terdepan untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Selama proses manajerial yang menjadikan kepala sekolah sebagai sentral ini dapat menimbulkan konsekuensi bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang sesuai standar. Dimana kompetensi berstandar

tersebut akan menjadi syarat bagi seorang kepala sekolah agar mumpuni dalam menjalankan tanggung jawab, tugas dan fungsinya menuju sekolah yang unggul.

Standarisasi kompetensi kepala sekolah secara legal telah diterbitkan Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dalam Pasal 2 dan 3 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bahwa ditetapkan persyaratan administrasi seperti memenuhi persyaratan akademik minimal sarjana (S-1) atau Diplomat IV (D-IV) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B; memiliki sertifikasi pendidik; memiliki hasil prestasi penilaian kerja guru minimal “Baik” selama 2 tahun terakhir; memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun, bagi calon kepala sekolah TK minimal 3 tahun; memiliki pengalaman manajerial yang relevan, sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya); tidak pernah dikenai hukuman disiplin; tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; berusia maksimal 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah (Nuridin et al, 2019).

Paradigma baru dalam manajemen pendidikan memberikan wewenang yang cukup besar kepada kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan begitu, kepala sekolah harus siap menanggung berbagai konsekuensi yang muncul. Disamping itu, arus globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdampak pada pengelolaan sekolah. Dalam praktiknya kepala sekolah dituntut untuk tetap mampu membangun kepercayaan, kolaborasi, dan kepemimpinan kolaboratif dalam segala situasi (Muslim, 2021). Karena kesuksesan sebuah sekolah dalam meningkatkan kualitasnya dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah.

Model kepemimpinan yang tepat untuk diaplikasikan dalam meningkatkan mutu pendidikan islam adalah kepemimpinan profetik.

Mengutip pendapat Adz-Dzakiey dalam Budiharto dan Himam (2006), pengertian kepemimpinan profetik adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan sebagaimana para nabi dan rosul atau *prophet* melakukannya. Istilah profetik di Indonesia di populerkan oleh Kuntowijoyo melalui gagasannya mengenai pentingnya ilmu sosial transformatif yang selanjutnya di sebut Ilmu Sosial Profetik (ISP) (Haikal et al, 2022). Ilmu sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa (Anwar, 2017). Hal ini diperkuat dengan pendapat Budiarto dalam Makruf (2017) yang menyebutkan nilai dasar *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah* sebagai nilai mutlak dalam menjalankan kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.

Perbedaan secara umum antara kepemimpinan profetik dengan kepemimpinan pada umumnya adalah ilmu sosial profetik mengusulkan perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu (dalam hal ini etika Islam), yang melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap *mode of thought* dan *mode of inquiry* bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi juga dari wahyu (Budiharto & Himam, 2006). Berdasarkan pengertian tersebut, kepemimpinan profetik yang merupakan model kepemimpinan yang disusun berlandaskan sudut pandang agama, yaitu Agama Islam yang di anut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Jadi kepemimpinan dalam ajaran islam tidak hanya tentang horizontal-formal antar sesama manusia, tetapi juga vertikal-moral, yaitu kepada Allah SWT.

Mengutip pendapat Kuntowijoyo dalam Masduki (2017) bahwa nilai-nilai profetik yang dijadikan tolak ukur perubahan sosial ini didasarkan pada Surah Ali Imron ayat 110 yang artinya “*Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan/dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada*

Allah". Kuntowijoyo menginterpretasikan bahwa dari ayat diatas terdapat tiga nilai dasar yaitu humanisasi, liberasi dan transedensi. Dari ketiga unsur nilai tersebut perlu untuk diuraikan :

Humanisasi sebagai derivasi dari *amar ma'ruf*, dimaknai menganjurkan atau menegakkan kebajikan, memanusiakan manusia dengan mengangkat dimensi dan potensi positif (*ma'ruf*) manusia untuk mengemansipasi manusia kepada *nur* atau cahaya petunjuk Ilahi mencapai keadaan *fitrah*. Liberasi sebagai derivasi *nahi munkar*, dimaknai melarang, mencegah semua tindak kejahatan. Pemaknaan dalam kepemimpinan profetik adalah pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Transedensi sebagai derivasi dari *tu'minuna bi Allah* (beriman kepada Allah) (Surya, 2013).

Peneliti melaksanakan observasi awal atau pra penelitian di SMA Muhammadiyah Bantul pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, untuk mendapatkan data melalui wawancara dan pengamatan kepada dua guru yang ada disana, narasumber EM selaku guru Bahasa Arab mengatakan :

"Kurang lebih yang bisa saya jelaskan, beliau jujur dan selalu apa adanya jika menyampaikan hal-hal yang penting kepada kami. Setiap mengadakan rapat pasti sudah ada catatan yang ingin disampaikan, nah dalam hal ini beliau adil dalam memutuskan sesuatu dengan pertimbangan mana yang lebih *urgent* pastinya. Selain itu, beliau juga tidak berat sebelah dalam sebuah musyawarah, bisa mengakomodasi pendapat dan masukan dari para guru atau karyawan, jadi bisa dibilang beliau bukan pribadi yang otoriter ya. Di sekolah kalau beliau dapat laporan yang jelek tentang seseorang atau sesuatu, tidak langsung memihak atau nyalahin, biasanya *kroscheck* langsung ke yang bersangkutan. Dari sudut pandang saya seperti itu lah beliau sejauh ini". (wawancara pada hari Rabu 29 November 2023)

Lebih mendalam peneliti mewawancarai Ustadzah GKW selaku guru PAI, menambahkan bahwa :

"Alhamdulillah saya bekerja disini sudah lumayan lama sekitar 6 tahunan, jadi cukup tau tentang beliau. Menurut pandangan saya, meskipun beliau itu perempuan tapi beliau tipikal pribadi yang tegas dan berani mengambil langkah. Tentu keputusan yang beliau berikan itu hasil dari kesepakatan bersama ketika kami mengadakan rapat. Beliau juga sudah punya pengalaman menjadi kepala sekolah selama 5 tahun sebelumnya di SMP Muhammadiyah Wonogiri,

dengan begitu beliau sudah ada bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Secara keagamaan beliau rajin ikut shalat berjama'ah di masjid sekolah, karena saya disini musyriyah dan bermukim jadi yang saya perhatikan kegiatan beliau selama di sekolah saja". (wawancara pada hari Senin 4 Desember 2023)

Melalui hasil observasi diatas, dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMA Muhammadiyah Bantul memiliki nilai-nilai kepemimpinan profetik yang bisa menjadi contoh untuk kepemimpinan sekolah lain. Bentuk penerapannya pada nilai humanisasi di sekolah dapat dilihat dari komunikasi antara kepala sekolah dengan para guru SMA Muhammadiyah Bantul terjalin dengan baik, yang artinya komunikasi berjalan secara dua arah bukan hanya dari atasan ke bawahan namun juga sebaliknya. Nilai liberasi nya pun bisa dilihat dari bagaimana setiap warga sekolah berhak untuk menyuarakan pendapatnya, dalam hal ini tidak selalu harus mengikuti perkataan pimpinan namun juga setiap orang berhak berpendapat apabila ada yang kurang tepat selama proses nya. Sedangkan nilai transedensi juga bisa dilihat dari banyaknya nilai-nilai islami yang ditanamkan di sekolah ini, baik itu untuk peserta didik, guru maupun karyawannya. Sedangkan dari pengamatan peneliti, bentuk nyata implementasinya adalah peserta didik memulai pembelajaran dengan tadarus bersama, melaksanakan shalat dhuha, bagi guru dan karyawan wajib mengikuti shalat dzuhur dan ashar berjama'ah di masjid sekolah, dan mengadakan kajian keputrian setiap hari jum'at dsb.

Di sekolah Muhammdiyah sering digunakan istilah kepemimpinan kolektif-kolegial, meskipun model kepemimpinan profetik ini masih jarang disinggung dalam teori-teori kepemimpinan pada umumnya. Pramitha dalam Al Fikri dan Arqam (2018) menjelaskan bahwa kepemimpinan kolektif-kolegial adalah suatu gaya kepemimpinan yang berlandaskan ikatan dan interaksi yang dilakukan secara bersamaan layaknya teman sejawat. *This style is seen as less professional because there is no concrete distribution of authority and job descriptions, but family culture is a force in encouraging collegiality in organizations* (Bidayati et al, 2020). Jadi

regulasi pola kolektif-kolegial dimana semua orang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab, artinya semua anggota organisasi memiliki posisi yang setara untuk menuangkan ide-idenya agar dapat mencapai tujuan bersama. Begitu juga jika diimplementasikan pada sekolah Muhammadiyah, yang dijalankan secara bersama oleh pimpinan sekolah seperti kepala, wakil kepala, sekretaris, bendahara dan kepala tata usaha.

Mengutip pendapat Haedar Nashir dalam buku “Muhammadiyah Mencerdaskan Anak Bangsa” karya Farid Setiawan, kepemimpinan di sekolah Muhammadiyah berbasis sistem, yakni mengacu pada aturan yang tersusun rapi dan dibingkai dalam bingkai organisasi yang solid (Setiawan, 2020). Dalam kesehariannya, tugas di sekolah ini pun dibagi sesuai dengan kemampuan para gurunya. Artinya tidak semua tugas dan tanggung jawab hanya di emban oleh kepala sekolah atau orang tertentu saja, namun semua guru dan karyawannya memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing.

Cakupan pembahasan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada dibawah naungan organisasi Muhammadiyah, ialah SMA Muhammadiyah Bantul (MUHIBA). Sekolah ini memiliki visi dan misi yang jelas dalam penerapan nilai-nilai kepemimpinan profetik oleh kepala sekolah. SMA Muhammadiyah Bantul memiliki visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, dan berkepribadian islami. Dalam upaya mencapai visi tersebut, kepala sekolah SMA Muhammadiyah Bantul mengintegrasikan pendidikan agama dan umum dalam proses pembelajarannya, hal tersebut sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menekankan pada pengetahuan dan watak.

Inilah yang membedakan antara SMA Muhammadiyah Bantul dengan sekolah lain. Problem yang terjadi belakangan ini di sekolah umum terutama Sekolah Negeri adalah kepala sekolah hanya fokus merapikan administrasi pendidikan, termasuk menerbitkan administrasi para guru namun lupa untuk memperhatikan siswa yang sebetulnya itu akan

meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Administrasi yang baik memang akan memberikan pandangan positif terhadap suatu lembaga, namun apabila hanya memperhatikan administrasi saja maka aspek lain akan terbengkalai. Jika sudah seperti itu, peserta didiklah yang dirugikan karena tidak mendapat hak yang seharusnya, yakni perhatian dan bimbingan dari para gurunya.

Masalah lain yang muncul yaitu banyaknya kepala sekolah yang kurang bisa mengayomi bawahannya sehingga kepemimpinan tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan yang di cita-citakan bersama. Maka apabila merujuk pada kepemimpinan zaman Rasul dan para sahabat, sifat-sifat kepemimpinan Rasul sangat bisa diterapkan dalam kepemimpinan apapun. Dapat menjadi contoh serta evaluasi dalam gaya kepemimpinan saat ini.

SMA Muhammadiyah Bantul didirikan pada tahun 1964. Informasi ini di dapat dari data dokumentasi sekolah dan wawancara singkat dengan mantan kepala sekolah sebelumnya. Sebagai salah satu sekolah swasta yang sudah berdiri sejak lama, maka tentu saja sudah tidak terhitung berapa banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didiknya, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Contohnya memperoleh *gold medal* pada lomba *Indonesia International Applied Science Project Olympiad* (IASPO) dan Nasional Olimpiade (NASPO) di ITS tahun 2023, Juara 1 Piala Walikota tahun 2023, Juara 2 Nasional Sepatu Roda Piala Bupati Siak Riau tahun 2023, dan Juara 2 Kejurda Kempo dsb (Bantul, 2024). Selain itu, sekolah juga mempunyai program unggulan yaitu kelas MBS (Muhammadiyah Boarding School) dan kelas reguler. Perbedaan antara keduanya terletak pada sistem mukim, dimana kelas MBS diwajibkan bagi peserta didiknya untuk menetap 24 jam di asrama dengan pendampingan oleh guru yang biasa disebut *ustadz* atau *ustadzah*.

Dengan pencapaian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah Bantul dijalankan oleh pemimpin yang cukup kompeten dalam bidangnya. Sebagai pemimpin utama dalam manajerial

sekolah, sudah seharusnya kepala sekolah memiliki nilai-nilai dasar kepemimpinan profetik seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, agar dapat memimpin sekolah mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Bantul mendapatkan penilaian yang baik dalam memimpin sekolah selama masa periode nya oleh para guru dan karyawannya. Kepala sekolah dinilai bijaksana, tegas, disiplin, dan cepat dalam mengambil keputusan namun juga sangat menerima saran dari bawahannya dengan telinga terbuka, sehingga dengan manajemen yang baik dan kerjasama yang solid, sekolah ini juga sudah mendapatkan akreditasi A.

Berangkat dari pemaparan di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus observasi lebih lanjut mengenai *“Kontekstualisasi Kepemimpinan Profetik Di SMA Muhammadiyah Bantul”*. Peneliti ingin melihat bagaimana kepemimpinan profetik yang diterapkan oleh kepala sekolah sekaligus keselarasan di lapangan dengan yang sering dipaparkan oleh khalayak ramai, agar dapat menjadi contoh bentuk kepemimpinan profetik yang dapat diimplementasikan dalam kancan dunia pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana bentuk penerapan kepemimpinan profetik Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bantul ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan kepemimpinan profetik Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana kepemimpinan profetik yang diterapkan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bantul.

2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kepemimpinan profetik Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, kebijakan, praktis, dan aksi sosial, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan profetik di sekolah, khususnya dalam konteks SMA Muhammadiyah Bantul.
 - b. Memberikan kontribusi baru dalam memahami dan menerapkan kepemimpinan profetik di sekolah yang berbasis nilai-nilai islam.
 - c. Memperkuat pemahaman tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
2. Kebijakan
 - a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung implementasi kepemimpinan profetik di sekolah.
 - b. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah melalui pengembangan kepemimpinan profetik para kepala sekolahnya.
 - c. Mendukung pengembangan sekolah-sekolah yang berkarakter dan berbasis nilai-nilai islam.
3. Secara Praktisi
 - a. Memberikan panduan bagi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan profetik di sekolahnya.
 - b. Membantu kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan kepeimpinannya.
 - c. Meningkatkan motivasi dan kinerja guru dan staf sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.

4. Aksi Sosial

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan profetik di sekolah.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan sekolah-sekolah yang berkarakter dan berbasis nilai-nilai Islam.
- c. Membangun budaya kepemimpinan profetik di masyarakat yang lebih luas.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur penyusunan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis, kebijakan, praktisi serta aksi sosial, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan landasan teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya berisi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta isu etik.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh, penyajian dan analisis data.

BAB V : Penutup. Pada bab ini didalamnya berisi pemaparan kesimpulan dan saran-saran yang dibutuhkan.